



**Ketika Pimpinan TNI, Polri, dan PNS Bersiap Hadapi Pemilu 2014**

## Tegaskan Netralitas, Janji Awasi Penggunaan Fasilitas Negara

**Pemilihan Umum (Pemilu) 2014** menghadirkan calon legislatif (caleg) dengan berbagai latar belakang. Ada yang TNI, Polri, atau PNS rawan menyalah sumpah kepada negara untuk tidak mendukung salah satu caleg.

Sebagian berjarak duduk. Sebagian lainnya berjarak berdiri di belakangnya. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian kasual yakni celana jins dan kaos beberapa kali memberikan "instruksi".

► **Baca Tegaskan... Hal 11**



### Laporkan Jika Ada Sosialisasi di Asrama Polri

**■ TEGASKAN...**  
Sambungan dari hal 1

Misalnya, dia meminta beberapa orang yang berada di tepi kanan dan kiri barisan untuk lebih rapat ke arah sebaliknya. Mereka yang berada di tepi kiri dan kanan pun segera menuruti instruksi tersebut.

"Tangan mengepal," perintah perempuan tersebut. Mereka yang ada di lokasi itu pun segera mengangkat tangan dengan posisi jari-jari mengepal.

Itu adalah pemandangan saat sesi foto bersama anggota TNI, Polri, dan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Perempuan pemberi instruksi itu adalah fotografer yang bertugas mengabadikan kebersamaan tersebut.

Kemarin pagi, TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang memiliki agenda bersama. Mereka berkoordinasi untuk mengorganisir pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) 9 April mendatang.

Khusus menghadapi pileg, ketiga aparaturnya ini menyiapkan diri secara khusus. Ini demi menjaga netralitas TNI, Polri, dan PNS saat pelaksanaan pileg nanti.

Khusus anggota TNI dan Polri, mereka tak memilih hak pilih. Tapi, anggota keluarganya yang tak menjadi anggota TNI memiliki hak suara. Hal ini menjadi perhatian mereka bersama.

Komandan Kodim 0734 Kota Jogja Letkol (Arh) Ananta Wira memastikan TNI tidak bersikap netral. Dia menyatakan, hal itu tercantum dalam instruksi yang diberikan oleh pimpinan TNI di lapangan. "Sanksi berat kalau sampai ada anggota TNI yang terbukti mendukung salah satu calon," kata dia.

Ananta juga menegaskan, netralitas tersebut hanya berlaku untuk anggota TNI. Keluarga dari anggota sipil. Mereka bebas menentukan pilihan. "Silakan mau memilih siapa," imbuhnya.

Khusus untuk menjaga netralitas, Kepala Polresta Jogja Kombes Slamet Santosa juga memberikan perhatian. Dia tak ingin terjadi penyalahgunaan fasilitas negara. Hal ini dia tekankan kepada semua jajarannya.

"Kepala asrama, kepala bagian kendaraan, sudah saya ingatkan untuk mengantisipasi adanya anggota yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye salah satu caleg," tandas Slamet.

Bahkan untuk memastikan tak adanya penyalahgunaan fasilitas negara di lingkungan kepolisian, Slamet mengajak masyarakat turut mengawasi. Jika melihat ada fasilitas negara disalahgunakan untuk kampanye, kata dia, masyarakat dapat melapor ke kepolisian.

"Ada Propam, silakan laporkan. Kalau misalnya, asrama Polri untuk sosialisasi caleg" imbuhnya.

Komitmen serupa juga ditunjukkan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Dia menegaskan, PNS tetap memiliki hak pilih. Hanya aturan menyebutkan PNS dilarang untuk berfiliasi dengan salah satu partai.

"Termasuk mendukung dengan memberikan kemudahan atau fasilitas negara," tutur HS.

Haryadi juga menyatakan semua fasilitas milik Pemkot Jogja tidak boleh dipakai untuk kepentingan kampanye caleg. Inspektoran Kota Jogja siap turun untuk melakukan pemantauan.

"Kendaraan dinas, kantor, dan fasilitas negara lain terlarang untuk kegiatan kampanye," tegasnya. (\*/amd/rp)

**Yogyakarta, ...**  
Kepala  
Tid

Ig. Trihastono, S.Sos, MM  
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Sejara	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 14 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005